



KR-Antara/M Risyah Hidayat

INSENTIF KENDARAAN LISTRIK: Pengunjung mengendarai sepeda motor listrik pada pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (20/2/2023). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan insentif untuk kendaraan listrik akan mulai diberikan Pemerintah pada Maret mendatang.

INSENTIF KENDARAAN LISTRIK HARUS TEPAT SASARAN

Mobil Rp 80 Juta, Motor Rp 8 Juta

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier menegaskan, insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang diberikan oleh Pemerintah harus diberikan secara tepat sasaran.

"Saya mendorong agar insentif akan diberikan oleh orang yang tepat, yang memang betul-betul dia mau beli motor listrik tapi duitnya pas-pasan," ujar Taufik Bawazier di arena Indonesia International Motor Show (IIMS), JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (20/2).

Taufik Bawazier mengatakan, untuk itu perlu adanya kolaborasi antarinstansi agar nantinya insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak

salah sasaran atau malah diberikan kepada kalangan yang memang memiliki kondisi ekonomi yang baik.

"Untuk datanya itu kan kita punya Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Nah ini data yang ingin dikroscek nantinya, siapa-siapa saja yang memang layak untuk diberikan insentif untuk beli kendaraan listrik," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dengan beralih ke kendaraan listrik dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan bakar minyak yang sudah mencapai 70 miliar liter pertahun. Karena itu, untuk mendorong populasi kendaraan elektrik di Indonesia, Pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan untuk mengeluarkan insentif bagi konsumen mobil listrik sebanyak Rp 80 juta, sedangkan untuk yang menggunakan hybrid mendapat insentif sebesar Rp 40 juta dan untuk motor listrik sebesar Rp 8 juta.

Pemerintah juga menyiapkan dana insentif sebesar Rp 5 juta perkonsumen yang memiliki keinginan beralih ke

kendaraan listrik dengan cara konversi. Pemerintah juga meyakini dengan adanya insentif kendaraan listrik, pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia akan semakin cepat bertumbuh.

Hingga kini, Taufik Bawazier menyatakan, sudah terdapat 41 produsen otomotif yang telah membuat pabrik pembuatan kendaraan listrik di Indonesia.

"Dengan adanya insentif ini diharapkan oleh Pemerintah, ekosistem kendaraan elektrik ini akan tumbuh. Industriawan melihat pasar Indonesia ini luar biasa, terdapat 41 pabrik EV di Indonesia. Artinya ada ekspektasi besar di pasar EV itu ada," tutupnya. (Ant/San)-d

DUGAAN PENCUCIAN UANG BUDHI SARWONO Kepala BPKAD Banjarnegara Diperiksa KPK

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS). Sehubungan hal itu, penyidik KPK memeriksa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjarnegara sebagai saksi kasus tersebut.

"Hari ini (Senin) penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi atas kasus dugaan TPPU untuk tersangka BS," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (20/2).

Pemeriksaan para saksi, menurutnya, akan dilakukan di Mako Brimob Kompi 2 Batalyon D Purwokerto, Jalan Letjen Suharto, Purwokerto Jawa Tengah. Mengenai saksi yang dipanggil penyidik KPK adalah Kepala BPKAD Kabupaten Banjarnegara Dwi Suryanto, Direktur CV Karya Bhakti merangkap Staf Administrasi PT Bumirejo Nursidi Budiono serta dua pihak swasta, Euodia

Linda Sosilo dan Boedhi Warman.

Dikemukakan, KPK kembali menetapkan mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus TPPU. Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus TPPU tersebut, menurut Ali, BS diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

"Hal ini di antaranya dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak," jelasnya.

Proses penyidikan saat ini, kata Ali, sedang berjalan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk menguraikan dugaan pencucian uang yang dilakukan Budhi tersebut. (Ful)-d

SEJAK JANUARI 2023

Lebih 38.000 Produk Tersertifikat Halal

JAKARTA (KR) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan 2.171 sertifikat halal (SH) sejak Januari 2023. Sehingga sebanyak 38.480 produk, termasuk di antaranya Mixue.

Keterangan ini disampaikan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta. "Sampai hari ini, tercatat ada 2.171 SH yang diterbitkan. Ini memuat 38.480 produk, termasuk Mixue yang SH-nya terbit tanggal 16 Februari 2023," ujar Aqil Irham, Senin (20/2/2023).

Selanjutnya, Aqil mempersiapkan pelaku usaha yang sudah memiliki produk bersertifikat untuk memasang label Halal Indonesia di produknya.

"Untuk pemasangan label Halal Indonesia, silakan mengacu pada

Kepkaban BPJPH No 40/2022. Ketentuan ini juga dapat diunduh melalui akun SiHalal masing-masing pelaku usaha," kata Aqil.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan, nomor yang dicantumkan dalam label merupakan nomor Sertifikat Halal yang dikeluarkan BPJPH.

"Ini jangan sampai salah. Karena masih ditemukan pada beberapa pelaku usaha, yang mereka cantumkan di label adalah nomor KH atau Ketetapan Halal," ungkap Aqil.

"Ini sekalian kami kembali mengingatkan, bila pelaku usaha baru memiliki nomor KH, artinya proses sertifikasi halalnya belum selesai. Pelaku usaha harus memiliki nomor sertifikasi halal, baru dapat dinyatakan proses sertifikasi produknya tuntas," tegasnya. (Ati)-d

LAYANI PENUMPANG DI CILACAP

Stasiun KA Jeruklegi Dihidupkan Lagi

PURWOKERTO (KR) - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 5 Purwokerto akan segera mengaktifkan kembali Stasiun Jeruklegi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang.

"Setelah kurang lebih 11 tahun tidak melayani naik-turun penumpang, Stasiun Jeruklegi akan diaktifkan kembali untuk layanan tersebut mulai 1 Maret 2023," kata Kepala PT KAI Daop 5 Purwokerto Daniel Johannes Hutabarat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (20/2) sore.

Dengan adanya reaktivasi tersebut, kata Daniel, Stasiun Jeruklegi yang selama 11 tahun terakhir hanya untuk persilangan KA Lintas Selatan dari dan menuju Bandung, akan kembali melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang.

Kendati demikian, ia mengatakan, Stasiun KA Jeruklegi untuk sementara hanya melayani satu perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) pergi pulang (PP) yakni KA Kutojaya Selatan

relasi Kutoarjo-Kiaracandong PP.

Dalam hal ini, lanjut Daniel, KA Kutojaya relasi Kutoarjo-Kiaracandong tiba di Stasiun Jeruklegi pukul 12.12 WIB dan diberangkatkan kembali pukul 12.26 WIB, sedangkan KA Kutojaya Selatan relasi Kiaracandong-Kutoarjo tiba di Stasiun Jeruklegi pukul 02.56 WIB dan diberangkatkan kembali pukul 03.05 WIB.

"Nantinya sebagai inovasi lanjutan guna meningkatkan layanan kepada pelanggan sekaligus untuk menambah keleluasaan kepada pelanggan dalam memilih jadwal, maka KA Baturraden Ekspres dan KA Serayu akan dilayani pula di Stasiun Jeruklegi," jelasnya.

Lebih lanjut, Daniel mengatakan, reaktivasi Stasiun KA Jeruklegi merupakan salah satu inovasi PT KAI Daop 5 Purwokerto dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan kereta api. Menurutnya, hal itu disebabkan PT KAI Daop 5 Purwokerto menargetkan sebanyak 3.067.046 pelanggan dapat dilayani pada tahun 2023 atau meningkat dari tahun 2022 yang mencapai

2.381.102 pelanggan. "Realisasi tahun 2022 tersebut juga melampaui dari jumlah yang diprogramkan sebesar 2.258.698 pelanggan," katanya.

Ia mengatakan, peningkatan volume penumpang tersebut dipengaruhi oleh melandainya pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Karena itu, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh masyarakat yang telah menggunakan angkutan kereta api selama 2022.

Terkait inovasi lainnya, Kadaop mengatakan, PT KAI (Persero) juga akan melakukan pembaruan aplikasi KAI Access dengan mengubah User Interface, sehingga memudahkan pelanggan untuk merencanakan perjalanannya menggunakan kereta api serta memenuhi kebutuhan gaya hidup lainnya dengan pengalaman yang berbeda.

"Layanan yang mendukung lifestyle (gaya hidup) tersebut juga memperhatikan kebutuhan pelanggan yang mayoritas kaum milenial, sehingga aplikasi KAI Access menjadi sebuah aplikasi super apps," kata Daniel. (Ant/Dri)-d

TAHUN TERAKHIR PEMERINTAHAN

Fokus Penurunan Kemiskinan Ekstrem-Stunting

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, program penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi fokus program jangka pendek yang dijalankan pada setahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya, satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen," kata Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/2).

Menkeu menjelaskan, Presiden berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada 2024 mendatang. Pada 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. Karena itu, Pemerintah memprioritaskan kebutuhan dana untuk penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun ini dan tahun depan.

Selain itu, Pemerintah juga mening-

katkan alokasi anggaran untuk penurunan stunting atau kasus anak ketes, menuju 3 persen pada 2024. "Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem yang tahun depan harus 0 persen, kemudian kemiskinan 'headline' di 6,5 hingga 7,5 persen, sedangkan untuk stunting diharapkan turun ke 3,8 persen," kata Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, prioritas kedua program ini tentunya berimplikasi pada anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, Pemerintah juga menggenjot investasi dapat meningkat secara signifikan, melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai. Adapun regulasi tersebut antara lain pelaksanaan UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU hubungan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintah juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk 'tax holiday', 'super deduction tax' untuk litbang, vokasi. Fasilitas pajak 'tax allowance' juga diberikan dalam rangka mendukung transformasi industri, terutama yang berbasis SDA bertujuan memperkuat industri otomotif yang

berbasis elektrik dan baterai.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem dilakukan secara simultan. "Karena masalah stunting dan kemiskinan ekstrem saling beririsan maka penanganannya dilakukan secara simultan," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy juga mengatakan, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem akan menjadi program yang berkelanjutan. "Penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan berkelanjutan, selama masih ada ibu hamil, selama masih ada bayi, masih ada anak balita, maka upaya pencegahan dan penanganan stunting mutlak dilakukan secara terus-menerus," katanya.

Menurut Muhadjir, program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan generasi unggul dan berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ant/San)-d



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

PANTAI PENUH SAMPAH: Pengunjung berdiri di tepi Pantai Gumuk Pasir, Kretek, Bantul, yang dipenuhi sampah, Senin (20/2/2023). Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan terbuaya arus banjir yang bermuara di pantai tersebut membuat kawasan Pantai Selatan Yogyakarta dipenuhi sampah.